

BAGIAN KEENAM PARTAI POLITIK

A. PENGERTIAN PARTAI POLITIK

Leon D. Epstein, mendefinisikan partai politik sebagai satu kelompok pengejar kedudukan pemerintahan yang secara bersama terikat pada identitas atau label yang dimilikinya. Sedangkan Sigmund Neumann, menyatakan partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Ramlan Surbakti (1992: 116) mendefinisikan partai secara lebih konkrit dan operasional dengan menyatakan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

B. ASAL-USUL PARTAI POLITIK

Partai politik jika dilihat dari asal-usulnya, paling tidak dapat dijelaskan melalui tiga teori yaitu: kelembagaan, situasi historik dan pembangunan (Surbakti, 1992: 113–114).

- a. Teori Kelembagaan. Teori ini, melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kalangan anggota parlemen (yang diangkat) karena kebutuhan untuk membina

- dukungan dari masyarakat, maka dibentuklah partai politik. Contohnya antara lain Partai Buruh di Inggris dan Australia.
- b. Teori Situasi Historis. Teori ini, menjelaskan timbulnya partai karena situasi perubahan dari masyarakat tradisional (strukturnya sederhana) ke masyarakat modern (strukturnya lebih kompleks). Perubahan itu menimbulkan tiga krisis, yaitu legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Untuk mengatasi ketiga krisis tersebut, maka dibentuklah partai politik.
 - c. Teori Pembangunan. Teori pembangunan, melihat timbulnya partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Modernisasi sosial ekonomi, melahirkan berbagai peningkatan dalam kehidupan, misalnya pendidikan dan industrialisasi. Juga pembentukan kelompok kepentingan dan organisasi profesi. Kondisi ini mendorong untuk perlu dibentuknya partai politik untuk memadukan dan memperjuangkan aspirasi mereka.

C. FUNGSI PARTAI POLITIK

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Jika suatu partai gagal untuk memerintah karena tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemilu, maka dapat menjalankan fungsi oposisi. Di samping itu partai politik juga memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai berikut: sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik (Surbakti, 1992: 116-121).

Gabriel A. Almond (dalam Mas'ood, dan MacAndrews, 1981) mengemukakan fungsi partai politik meliputi: sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan pembuatan kebijakan. Roy C. Macridis (Amal [ed.], 1996: 26) melihat fungsi partai politik secara

umum meliputi: representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah.

Ini berarti di samping fungsi-fungsi di atas, dapat ditambahkan lagi fungsi partai politik yang tidak disebutkan dalam pendapat sebelumnya yaitu fungsi persuasi dan fungsi represi. Uraian mengenai fungsi-fungsi partai politik sebagai berikut.

- a. Sosialisasi Politik. Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan metode penyampaian dapat dilakukan dengan pendidikan politik dan indoktrinasi politik.
- b. Rekrutmen Politik. Rekrutmen politik yakni seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
- c. Partisipasi Politik. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.
- d. Artikulasi Kepentingan. Artikulasi kepentingan (*interest articulation*) merupakan kegiatan partai politik untuk membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Misalnya, partai bertemu atau mengundang berbagai kelompok kepentingan untuk menyatakan tuntutan dan keinginan mereka berkaitan dengan suatu kebijakan publik.
- e. Pemadu Kepentingan. Pemadu kepentingan (*interest aggregation*) merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan